

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Public Relations* atau humas merupakan posisi yang penting dan sangat berpengaruh dalam membentuk maupun menjaga citra yang baik bagi suatu instansi. Menurut The British Institute of Public Relations dalam Ruslan (2014:16) praktik *Public Relations* adalah memikirkan, merencanakan dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Seorang humas harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur hubungan antara instansinya dengan publik luar, baik dengan para masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang terkait seperti contohnya hubungan dengan media. Melihat dari pentingnya suatu tugas humas ini maka semua instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki posisi humas di dalam struktur organisasinya. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki posisi humas di dalamnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau disingkat Kemenkominfo. Menurut John D. Millett dalam Ruslan (2014:341) terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utama suatu humas pemerintahan, salah satunya yaitu kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan.

Banyak hal yang dapat dilakukan humas dalam mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan antara instansinya dengan publik eksternalnya, salah satunya adalah dengan kegiatan media monitoring. Hendri (2018:138) mengatakan media monitoring adalah kegiatan memantau dan mendokumentasikan berita dalam bentuk kliping media informasi di media massa cetak maupun elektronik. Media monitoring ini pun bermanfaat dalam melakukan evaluasi dari salah satu kegiatan humas yaitu *Media Relations*. *Media relations* sendiri dilakukan humas guna mendapatkan hubungan yang baik dengan pihak media yang mempublikasikan pemberitaan mengenai instansi itu sendiri. Hal ini menjadikan keberhasilan *media relations* ini dapat dilihat dari publikasi yang optimal, apakah pemberitaan atau tulisan tersebut membawa isu positif atau negatif bagi masyarakat terhadap perusahaan dan dukungan khalayak terhadap aktivitas, pendapat, kebijakan dan peraturan organisasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi-informasi tersebut dengan mudah didapatkan dari hasil kegiatan media monitoring. Maka seorang *Media relations officer* (MRO) atau seorang praktisi *media relations* harus memiliki keterampilan monitoring media didalamnya.

Di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) sendiri terdapat biro humas atau biro hubungan masyarakat yang berada dibawah perintah langsung Sekretariat Jendral Kemenkominfo. Biro humas ini memiliki tugas tertulis yang sudah terdapat pada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan *online* rakyat baik langsung maupun melalui media. Dari data yang didapatkan langsung kegiatan media monitoring ini merupakan bagian dari tugas pelayanan informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

biro humas. Kegiatan media monitoring ini sangat mempengaruhi seluruh bagian Kemenkominfo bukan hanya bagian biro humas saja. Hasil dari media monitoring biro humas menjadi informasi penting bagi pihak internal Kemenkominfo lainnya, karena informasi yang didapatkan dari media monitoring menjadi salah satu bahan analisa kebijakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan Kemenkominfo selanjutnya, agar kebijakan yang diputuskan dapat mempengaruhi citra Kemenkominfo lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan atau kebijakan yang dikarenakan tidak melihatnya pemberitaan mengenai instansi di media.

Melihat dari pentingnya media monitoring dengan tugas seorang humas Kemenkominfo, maka sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana proses suatu media monitoring di Kemenkominfo berlangsung. Karena proses media monitoring ini memiliki dampak yang sangat penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan maupun tugas-tugas Kemenkominfo yang dapat dilakukan lebih baik dan benar lagi jika terdapat proses media monitoring didalamnya. Dengan mengetahui bagaimana proses media monitoring di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI kita dapat mengetahui apa saja hal-hal yang harus dilakukan seorang humas maupun hal-hal apa saja yang harus diperisapkan agar proses media monitoring tersebut dapat berjalan dengan baik seperti pada media monitoring Kemenkominfo. Maka dari itu penulis mengambil topik bahasan mengenai Monitoring Media di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada Laporan Akhir ini, meliputi:

- 1) Bagaimana monitoring media oleh Biro Humas di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI?
- 2) Bagaimana hambatan dan solusi dalam proses monitoring media oleh Biro Humas di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI?

### **Tujuan**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan dalam penulisan Laporan Akhir ini, meliputi:

- 1) Menjelaskan monitoring media oleh Biro Humas di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- 2) Mengetahui bagaimana hambatan dan solusi dalam monitoring media oleh Biro Humas di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

### **METODE**

#### **Lokasi dan Waktu**

Laporan Akhir ini disusun berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berlokasi di Jalan Medan Merdeka